

## Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kudeta Militer Terhadap Perdana Menteri Laisenia Qarase Di Negara Republik Fiji

(The Underlying of Military Coup Toward Prime Minister Laisenia Qarase in Republik Fiji)

Rahmawati Mauliddah  
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

### Abstrak

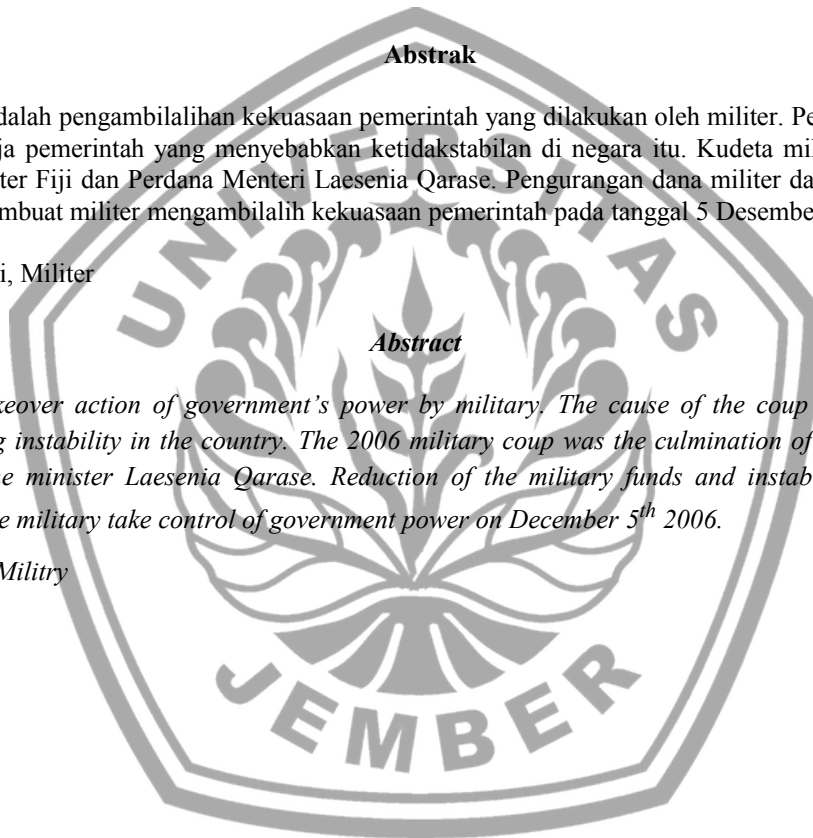
Kudeta di negara Fiji adalah pengambilalihan kekuasaan pemerintah yang dilakukan oleh militer. Penyebab kudeta ini adalah kurang bagusnya kinerja pemerintah yang menyebabkan ketidakstabilan di negara itu. Kudeta militer 2006 adalah puncak dari konflik antara militer Fiji dan Perdana Menteri Laesenia Qarase. Pengurangan dana militer dan ketidakstabilan Negara pada perekonomian membuat militer mengambilalih kekuasaan pemerintah pada tanggal 5 Desember 2006.

Kata kunci : kudeta, Fiji, Militer

### Abstract

*a coup in Fiji was takeover action of government's power by military. The cause of the coup is government's lack of knowledge that causing instability in the country. The 2006 military coup was the culmination of the conflict between the Fiji military and Prime minister Laesenia Qarase. Reduction of the military funds and instability of the State mostly economics has made the military take control of government power on December 5<sup>th</sup> 2006.*

*Keywords: Coup, Fiji, Militory*



## Pendahuluan

Republik Fiji adalah negara kepulauan yang berada di Pasifik Selatan, terletak di zone pertemuan antara Melanesia dan Polinesia. Mempunyai luas wilayah sekitar 18.500 km<sup>2</sup>, yang mayoritas merupakan gugusan kepulauan besar maupun kecil (sekitar 840 pulau). Fiji, pertama kali ditemukan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman ketika berusaha menemukan Benua Selatan Besar pada 1643. Ekspedisi ini kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi penjelajah lainnya seperti Kapten James Cook pada tahun 1774 dan Charles Wilkes pada tahun 1884. Kepulauan ini kemudian jatuh ke tangan Britania Raya dan dijadikan sebagai koloni pada 1874.<sup>[1]</sup> Pada masa Gubernur Jenderal Sir Arthur Hamilton-Gordon, Fiji dilanda wabah penyakit menular. Pada tahun 1875 penduduk Fiji diperkirakan mencapai 200.000 jiwa. Namun akibat wabah penyakit yang berkepanjangan, pada tahun 1880 diketahui populasi penduduk asli Fiji hanya tinggal 87.000 jiwa saja. Kolonial Inggris yang sedang membangun kembali perekonomiannya, berusaha meningkatkan pendapatan dengan menggalakkan berbagai sektor industri di berbagai negara jajahannya termasuk Fiji.<sup>[2]</sup>

Luasnya areal perkebunan dan kurangnya tenaga kerja, maka untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja, pemerintah kolonial Inggris kemudian mendatangkan pekerja dari daerah Hindustan yang mayoritas adalah etnis India karena dianggap lebih memahami dalam hal pertanian dan perkebunan apabila dibandingkan dengan penduduk asli Fiji yang sebagian besar hidup didaerah pesisir dan mencari nafkah sebagai nelayan.<sup>[3]</sup> Diperkirakan sejak tahun 1879-1916 jumlah pekerja migran etnis India di Fiji telah mencapai 60.000 jiwa, dimana 45.000 pekerja tersebut berasal dari India Utara dan sisanya berasal dari wilayah India bagian selatan.<sup>[4]</sup>

Banyaknya tenaga kerja Etnis India yang di datangkan ke Fiji, kemudian menimbulkan konflik sosial yaitu perselisihan antar etnis. Pribumi menganggap etnis pendatang adalah golongan pekerja atau kuli kontrak, sedangkan pribumi Fiji adalah penduduk asli yang bebas dan merupakan pemilik tanah atau lahan baik perkebunan maupun areal pertanian. Konflik antar etnis kemudian menimbulkan polarisasi kesukuan yang menjurus pada rasialisme etnis dengan adanya sebutan etnis Fiji untuk penduduk asli dan etnis Indo Fiji untuk penduduk pendatang baik dimasa Fiji belum merdeka maupun di era Fiji modern yang kemudian dikenal.<sup>[5]</sup>

Konflik antar etnis inilah yang kemudian membuat Fiji mengalami empat kali kudeta sejak merdeka pada tahun 1970 hingga tahun 2006. Kudeta pertama terjadi pada tanggal 14 Mei 1987, disusul dengan kudeta kedua pada 12 September 1987. Kudeta pertama maupun kudeta kedua, merupakan kudeta yang dilakukan oleh militer dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka. Kudeta dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintahan sipil Perdana Menteri Timoci Bavadra karena pemerintahan dianggap di dominasi oleh etnis Indo Fiji.<sup>[6]</sup>

Fiji kembali melaksanakan pemilihan umum pada bulan Mei tahun 1999 merupakan titik awal penerapan demokrasi di

bawah konstitusi baru. Partai koalisi Rabuka yang berasal dari etnis Fiji, dikalahkan oleh gabungan Partai Indo-Fiji pimpinan Mahendra Chaudry. Berkuasanya partai etnis Indo Fiji, memicu lahirnya agitasi politik dikalangan etnis Fiji yang was-was dan takut adanya perampasan politik oleh etnis Indo-Fiji yang menguasai parlemen. Hal ini kemudian membuat George Speght melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Mahendra Chaudhry pada Mei tahun 2000.<sup>[7]</sup>

Menjelang akhir tahun 2000, situasi pemerintahan kembali pulih setelah militer dibawah komando Komodor Frank Bainamarama berhasil memadamkan kudeta dan mengambil alih pemerintahan. Militer kemudian melantik mantan Bankir, Laisenia Qarase sebagai Perdana Menteri sementara. Pada tahun 2001, Fiji kembali menyelenggarakan pemilihan umum. Partai Soqosoqo Duavata Ni Lewenivanua (SDL) yang dipimpin Qarase memenangkan pemilu dan mengantarkan Qarase ke kursi perdana menteri.<sup>[8]</sup>

Masa kepemimpinan Qarase, selain masih terjadinya konflik antar etnis baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, terjadi pula konflik antara pemerintah sipil dengan militer. Elit politik pemerintahan sipil yang berkuasa, merasa bahwa kalangan militer dibawah pimpinan komodor Frank Bainamarama merupakan ancaman serius bagi kelangsungan pemerintahan sipil Fiji. Pemerintahan sipil menganggap bahwa militer merupakan salah satu kekuatan penghalang yang sering ikut campur dan menentang kebijaksanaan pemerintahan sipil. Sejak tahun 2001 setelah pemilihan umum dilaksanakan, elit politik dalam pemerintahan Fiji telah berusaha mengurangi pengaruh komodor Frank Bainamarama di kalangan militer. Beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah sipil Fiji adalah dengan menunjuk Frank Bainamarama sebagai duta Besar Fiji dan memensiunkan Bainamarama sebagai pejabat pemerintah Fiji. Namun berbagai upaya yang dilakukan tersebut gagal karena kuatnya dukungan militer terhadap Komodor Frank Bainamarama.<sup>[9]</sup>

Akumulasi kurang harmonisnya hubungan militer dan pemerintahan sipil Fiji mencapai klimaknya pada tanggal 5 Desember 2006. Pimpinan tertinggi militer Fiji, Komodor Frank Bainamarama menyerbu serta mengambil alih markas besar kepolisian Fiji di Suva, memberlakukan tahanan rumah terhadap seluruh menteri maupun pejabat pemerintahan sipil Fiji dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa militer mengambil alih kekuasaan dari tangan perdana menteri Laesinia Qarase.

## Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penulisan deskriptif atau studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data lebih difokuskan pada informasi-informasi atau kajian yang diperoleh dari buku, surat kabar elektronik, dan publikasi dari instansi-instansi terkait yang relevan dengan peristiwa dalam artikel ilmiah ini. Selain itu, data-data yang diperoleh berasal dari media internet sebagai penunjang informasi untuk keperluan analisis. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisa

permasalahan dalam artikel ilmiah ini adalah Teori Faktor Penyebab Kudeta. Teori Faktor penyebab kudeta digunakan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta di Militer di negara Fiji.

### Hasil dan Pembahasan

Kudeta tahun 2006 di Fiji, merupakan kudeta yang keempat sejak Fiji Merdeka dan merupakan kudeta yang ketiga, dilakukan oleh militer. Kudeta militer pada tahun 2006, merupakan puncak dari perseteruan antara militer dan pemerintahan sipil. Perseteruan militer dan pemerintah sipil yang berkuasa, diawali oleh kekecewaan militer terhadap berbagai kebijakan pemerintah, ditambah dengan memburuknya situasi serta kondisi politik, sosial dan ekonomi di Fiji. Kebijakan pemerintah terhadap institusi militer berupa pemotongan alokasi anggaran belanja militer telah menimbulkan kekecewaan kalangan militer khususnya di kalangan perwira tinggi. Semakin rendahnya penetapan alokasi belanja militer oleh pemerintah sipil, telah membuat berbagai program yang direncanakan oleh militer terbengkalai. Selain itu, perseteruan politik antar etnis dan kondisi ekonomi Fiji yang kian menurun membuat laju inflasi semakin tinggi. Hal ini kemudian memicu semakin tingginya angka kriminalitas dan huru-hara yang membuat situasi dan kondisi keamanan di Fiji memburuk. Polisi Fiji sebagai aparat sipil yang mempunyai tugas untuk mengamankan situasi keamanan tidak mampu mengamankan situasi. Situasi dan kondisi yang terjadi di Fiji ini kemudian memicu munculnya suara-suara negatif dari pihak militer terhadap pemerintahan sipil.

Menilik latar belakang kudeta militer Fiji pada tahun 2006, maka pada dasarnya kudeta yang terjadi dipicu oleh dua faktor, yaitu atau mendorong tindakan militer untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, karena kurang cakupannya elit sipil pemerintahan menjalankan roda pemerintahan.[\[10\]](#)

#### 1. Kepentingan Korporat Militer

Kepentingan militer yang dimaksud adalah berbagai kepentingan militer Fiji sebagai sebuah organisasi atau institusi. Pembelian persenjataan baru, perawatan peralatan, *rekrutment* personil, gaji, tunjangan personil dan berbagai peningkatan sarana maupun prasarana militer, merupakan kebutuhan umum militer sebagai sebuah institusi yang membutuhkan alokasi anggaran dana yang cukup besar. Selain kepentingan secara umum, kepentingan militer yang dimaksud dapat diartikan pula sebagai kepentingan personil-personil militer, dalam hal ini adalah para perwira tinggi di tubuh militer Fiji. Selain pengertian-pengertian tersebut, upaya campur tangan pihak-pihak tertentu terhadap militer maupun terhadap perwira militer, dapat pula diartikan sebagai ancaman terhadap independensi militer (otonomi militer). Apabila ditelaah lebih lanjut, penyebab kudeta militer Fiji dapat disebabkan oleh berbagai peristiwa sebagaimana berikut.

##### a. Pengurangan Anggaran Belanja Militer

Perubahan orientasi dan persepsi kalangan militer baik secara individu maupun kelompok terhadap pemerintahan sipil Qarase, terlihat ketika pemerintah sipil Fiji mengurangi anggaran belanja militer. Sejak periode tahun 1987 hingga periode tahun 2000, *Republic Fiji Military Force* (RFMF) merupakan salah satu lembaga negara yang mendapatkan proporsi alokasi anggaran belanja negara yang cukup besar dan selalu mendapatkan kenaikan dalam setiap periode pengajuan anggaran belanja.

Alokasi anggaran belanja militer Fiji, sebagian besar digunakan untuk perekrutan anggota militer, kesejahteraan personil-personil militer seperti gaji, dan tunjangan kesehatan, modernisasi peralatan militer dan pengiriman personil militer Fiji untuk tugas kemanusiaan dibawah legitimasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).[\[11\]](#) Pada tahun 1998, isu terorisme global global dan peningkatan kekuatan militer baik dari persenjataan maupun peningkatan kemampuan personil membuat pihak militer mengajukan alokasi dana belanja militer yang semakin besar. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan alokasi anggaran belanja militer pada tahun 1992, dimana anggaran militer Fiji naik cukup signifikan yaitu dari \$ 76.400.000 menjadi \$ 96.800.000.[\[12\]](#)

Masa pemerintahan Perdana Menteri Laesenia Qarase, pemerintah menetapkan anggaran belanja militer hanya sebesar \$ 67.000.000 serta mengusulkan mengurangi jumlah personil RFMF sebesar 50% dari jumlah yang ada.[\[13\]](#) Militer Fiji sebagai lembaga pertahanan dan keamanan negara menyadari bahwa sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, maka militer Fiji harus selalu siap menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang berusaha mengganggu integritas Fiji dan keamanan nasional. Tanggung jawab yang dipikul, mengharuskan militer Fiji mempunyai personil militer yang terlatih dan didukung oleh berbagai persenjataan serta sarana prasarana peralatan militer dengan teknologi modern. Sebagai bentuk upaya peningkatan kemampuan tempur dan komunikasi antar personil militer Fiji. Selain melakukan latihan tempur sebagaimana layaknya personil militer, militer Fiji juga sering melakukan latihan gabungan dengan negara-negara lain di pasifik selatan, seperti Australia dan Selandia Baru. Latihan gabungan antar negara baik di Fiji maupun di luar Fiji, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar personil militer kedua negara, sekaligus sarana untuk meningkatkan kemampuan tempur personil militer Fiji. Latihan gabungan juga merupakan ajang untuk menunjukkan *prestise* militer Fiji dikawasan regional pasifik selatan maupun dunia internasional, baik dari segi kemampuan personil, persenjataan dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, melalui latihan gabungan dengan berbagai negara seperti Australia dan New Zealand, maka militer Fiji dapat mengetahui tolok ukur kemampuan personil, teknik dan strategi pertempuran, persenjataan dan teknologi militer yang dimiliki. Apabila dirasakan kemampuan militer sudah tertinggal baik itu dari kemampuan personil, strategi, persenjataan maupun sarana prasarana pendukung lainnya, maka militer Fiji akan berupaya meningkatkan kemampuannya. Peningkatan kemampuan personil dilakukan

militer Fiji dengan mengirimkan personil-personil terpilih untuk mempelajari teknik dan strategi militer ke berbagai negara seperti Australia, Inggris dan Amerika. Peningkatan persenjataan dan sarana prasarana pendukung militer yang dirasa kurang memadai atau sudah tertinggal, dilakukan dengan membeli persenjataan serta sarana dan prasarana pendukung yang lebih modern ke beberapa negara produsen senjata di kawasan Asia, Eropa maupun Amerika.<sup>[14]</sup>

Anggaran belanja militer Fiji, juga dipergunakan untuk melakukan perekrutan dan pelatihan personil baru. Regenerasi personil militer Fiji dilakukan setiap tahun, dengan melakukan perekrutan terhadap warga negara Fiji yang bersedia menjadi anggota *Republic Fiji Military Force* (RFMF). Warga Fiji yang berminat dapat mendaftarkan diri ke departemen pertahanan di propinsi pendaftar. Warga negara Fiji yang menjadi personil militer Fiji akan mendapatkan hak berupa upah atau gaji setiap bulannya, rumah dinas, kenaikan jabatan, promosi, bonus dan berbagai fasilitas lainnya tergantung dari tingkat dan jabatan dari setiap personil Fiji. Pengurangan anggaran belanja militer Fiji oleh pemerintahan sipil Qarase, membuat program perekrutan dan pelatihan personil militer dapat terhenti. Selain itu, pengurangan anggaran belanja dapat berakibat pada kurangnya kesejahteraan para personil militer, karena gaji yang diterima personil militer termasuk dalam anggaran belanja militer.

#### b. Otonomi Militer

Militer Fiji merupakan institusi negara yang mempunyai tatanan dan aturan sendiri. Sejak awal perekrutan dan pendidikan personil militer, telah ditanamkan rasa solidaritas, persaudaraan, kesetiaan, kebanggaan dan kepatuhan terhadap rantai komando dan korps. Kuatnya rasa solidaritas, persaudaraan dan setia kawan yang ditanamkan kepada setiap personil militer menjadikan hubungan antar personil Fiji dalam satu kesatuan rasa (*spirit de corps*). Kebanggaan terhadap korps, loyalitas dan kepatuhan terhadap rantai komando, menjadikan militer Fiji sebagai institusi yang solid dan terorganisir dengan baik. Kebijakan militer Fiji yang meliputi perekrutan, pelatihan, pendidikan, promosi, mutasi, kenaikan maupun penurunan jabatan dan pemberhentian personil, merupakan kebijakan intern militer Fiji sebagai institusi. Pihak diluar militer tidak berhak dan tidak diperbolehkan ikut campur atas kebijakan tersebut. Upaya pihak diluar militer untuk ikut campur terhadap kebijakan militer maupun terhadap personil militer aktif dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap seluruh personil militer maupun terhadap militer sendiri sebagai korps.<sup>[15]</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 2005, militer Fiji melalui komandan RFMF yaitu Komodor Frank Bainamarama melakukan protes terhadap kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Qarase, yang isinya menyatakan bahwa anggaran belanja militer dan kepolisian berada dibawah pengawasan dan kontrol departemen dalam negeri yang dipimpin oleh menteri Vosanibola. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap berbagai pengeluaran anggaran belanja militer. Kebijakan ini ditanggapi Banamarama dengan mengatakan, setelah

anggaran keuangan militer dikendalikan oleh departemen dalam negeri, maka semua tindakan militer akan dipolitisasi, sehingga operasional dan kebijakan militer tidak lagi berada ditangan militer tetapi ditangan elit politik pemerintahan sipil.<sup>[16]</sup>

Kebijakan pemerintah berupa upaya memindahkan pengendalian keuangan militer dari tangan militer ke departemen dalam negeri, merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan secara struktural pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam konstitusi Fiji, posisi militer berbeda dengan departemen kepolisian. Posisi departemen kepolisian dalam struktur pemerintah Fiji, memang berada di bawah departemen dalam negeri, sehingga apabila pemerintah Fiji mengeluarkan kebijakan yang isinya berupa pengawasan dan pengendalian keuangan Departemen Kepolisian oleh Departemen Dalam Negeri, maka kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar. Berbeda dengan militer, dalam konstitusi Fiji telah disebutkan bahwa secara structural posisi militer Fiji merupakan lembaga yang independen atau berdiri sendiri. Merupakan hal yang wajar sebagai lembaga yang independen apabila militer mengendalikan sendiri anggaran yang diterima dari pemerintah, karena apa yang dibutuhkan oleh militer hanya pihak militer sendiri yang tahu apa yang mereka butuhkan. Selain itu, pengeluaran militer dalam hal pembelanjaan peralatan militer dan personil militer, merupakan hal yang riskan atau berisiko tinggi apabila dikendalikan oleh pihak diluar militer, karena hal ini menyangkut kerahasiaan kekuatan militer suatu negara yang berhubungan dengan keamanan nasional.<sup>[17]</sup>

#### 2. Kegagalan Pemerintah Sipil

Situasi dan kondisi Fiji yang kurang kondusif, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, merupakan kegagalan pemerintah Fiji menjalankan roda pemerintahan. Laju inflasi yang semakin tinggi akibat merosotnya perekonomian Fiji, membuat harga-harga berbagai kebutuhan pokok melonjak tinggi. Merosotnya perekonomian Fiji juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang tepat karena dilandasi oleh kepentingan politik etnis. Akibatnya, kehidupan sosial masyarakat Fiji menjadi kurang harmonis karena adanya persaingan antara dua etnis mayoritas yang ada dimasyarakat Fiji. Persaingan antar etnis Fiji kemudian memicu tindakan rasialis yang berujung pada pertentangan antar etnis dan memicu lahirnya berbagai tindakan kekerasan, kriminalitas dan huru hara. yang menjurus pada. Kegagalan pemerintah Fiji menjalankan roda pemerintahan kemudian memicu militer untuk berupaya mengakhiri situasi dan kondisi yang terjadi melalui kudeta.

#### a. Kebijakan Inkonstitusional

Kebijakan-kebijakan politik pemerintahan Perdana Menteri Qarase oleh beberapa pihak sering dianggap kontroversial karena bertentangan dengan undang-undang (konstitusi) Fiji. Selain elit politik, pihak yang sering mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah adalah militer. Menurut persepsi militer, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dapat mengganggu integritas nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah Qarase

yang dianggap controversial adalah ketika pada tahun 2003, atas desakan elit politik di pemerintahannya, Qarase mengusulkan diberikannya keringanan hukuman kepada para pelaku kudeta tahun 2000. [18] Usulan Qarase ini ditentang oleh kalangan militer karena berdasarkan keputusan pengadilan, para pelaku kudeta tahun 2000 telah terbukti dan dinyatakan bersalah. Kesalahan yang telah dilakukan ini sudah sepatutnya untuk mendapatkan hukuman sesuai keputusan dan ketentuan undang-undang. Bainamarama sebagai komandan RFMF, menentang usulan ini dan menyatakan bahwa upaya untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku kudeta tahun 2000 merupakan tindakan inkonstitusional. [19]

April Tahun 2004, pemerintah Perdana Menteri Qarase kembali mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan pertentangan di parlemen. Usulan kebijakan yang dimaksud adalah amandemen konstitusi Fiji tahun 2007 perihal pejabat pemerintah di posisi vital terutama pengangkatan komandan RFMF. Elit politik pemerintahan Qarase menginginkan perdana menteri diberi kewenangan untuk ikut menentukan pengangkatan komandan RFMF. Usulan ini ditentang oleh militer Fiji karena konstitusi yang ada sudah sesuai dengan struktur pemerintahan Fiji. Dalam struktur pemerintahan Fiji, militer berada dibawah komando langsung presiden sebagai panglima tertinggi militer Fiji, maka hanya presiden yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengangkat komandan RFMF. Penolakan militer ini mendapat dukungan mayoritas suara di parlemen, elit politik Fiji dari partai oposisi dan perwakilan daerah menganggap bahwa usulan perdana menteri untuk melakukan amandemen merupakan trik politik yang dilatar belakangi upaya pihak-pihak tertentu untuk menyingkirkan Bainamarama dari kepemimpinannya dimiliter.

Pada tanggal 5 Oktober 2005, pemerintah mengusulkan kebijakan pengendalian keuangan militer dari tangan militer ke departemen dalam negeri. Kebijakan ini dianggap tidak konstitusional karena dalam konstitusi Fiji telah disebutkan bahwa secara structural posisi militer Fiji merupakan lembaga yang independen yang dapat mengendalikan sendiri anggaran yang diterima dari pemerintah. [20]

#### b. Kemerosotan Ekonomi

Merosotnya perekonomian Fiji dapat diketahui dari perbandingan antara ekspor dan impor yang timpang cukup tajam. Kinerja ekspor dan impor Fiji mengalami ketimpangan yang cukup tajam setiap tahunnya. Pada tahun 2001, total ekspor Fiji sebesar 1.221 ton sedangkan import mencapai 2.017 ton. Perbandingan nilai total ekspor dan nilai impor membuat neraca perdagangan Fiji minus 796. Demikian pula pada tahun-tahun berikutnya, perbandingan nilai total ekspor dan import Fiji masih mengalami ketimpangan sehingga neraca perdagangan masih menunjukkan nilai minus. Sektor perekonomian yang selain ditunjang oleh kinerja industri ekspor gula, juga ditunjang oleh ekspor garmen. Industri gula merupakan penghubung penting bagi perekonomian Fiji, sektor industry gula merupakan penyumbang tujuhbelas persen dari PDB Fiji, dan menghasilkan rata-rata 30 persen dari total ekspor domestic. Penurunan produksi gula dikaitkan dengan

berakhirnya sewa tanah di bawah perjanjian ALTA sejak tahun 1997. *Fiji Sugar Corporation* (FSC) memperkirakan hilangnya sekitar 16.000 hektar lahan produktif pertanian tebu sejak sewa tanah banyak yang mulai berakhir pada tahun 1997. Kebijakan pemerintah dalam hal sewa lahan pertanian telah membuat petani tebu yang mayoritas berasal dari etnis Indo Fiji enggan untuk memperluas atau memperpanjang sewa lahan. Selain itu, adanya keinginan pemilik lahan untuk tidak menyewakan lahannya dan memilih untuk mengolah sendiri lahan pertaniannya, membuat produksi tebu ikut turun.

Keterpurukan ekonomi Fiji juga akibat kurang baiknya kinerja NBF (*National bank of Fiji*) sebagai lembaga perbankan pemerintah. Kinerja perbankan yang masih banyak dilatarbelakangi oleh kebijakan dominasi etnis, menyebabkan lembaga keuangan pemerintah ini lebih banyak mengucurkan dana kredit bantuan kepada etnis pribumi. Dikemudian hari, kebijakan ini menjadi boomerang bagi lembaga keuangan nomer satu di Fiji, karena tingginya angka kemacetan kredit yang mencapai F\$ 200.000.000.000. (dua ratus trilyun dolar Fiji). [21]

#### Kesimpulan

Kudeta tahun 2006 di Fiji merupakan kudeta yang keempat sejak Fiji Merdeka dan merupakan kudeta yang ketiga, dilakukan oleh militer. Kudeta militer tahun 2006, secara umum memang merupakan upaya mengambil alih kekuasaan secara paksa dari tangan sipil. Namun perlu dipahami bahwa tendensi yang menyebabkan kudeta militer tahun 2006, dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang berhubungan situasi dan kondisi yang terjadi di Fiji. Kudeta militer Fiji tahun 2006, sebagaimana disampaikan oleh komandan *Republic Of Fiji Military Force* (RFMF) Komodor Frank Bainamarama, merupakan tindakan yang terpaksa dilakukan oleh militer untuk mempertahankan kepentingan militer akibat adanya pengurangan dana dan pengurangan personil oleh pemerintah. Selain itu, kudeta tahun 2006 merupakan tindakan yang dilakukan oleh militer untuk memulihkan stabilitas negara akibat kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

#### Daftar pustaka

- [1] Paul Spickard, 2005. *Race and Power in Fiji*. Paper presented to the Social Science History Association, Chicago. hlm 6 [online] <http://www.education.ucsb.edu/socialjustice/spickard.pdf>
- [2] Brij V. Lal, 2008. *A Time Bomb Lies Buried : Fiji's Road to Independence, 1969-1970*. Acton A.C.N.E : ANU E press. Hlm 10
- [3] Drcyk Scarr, 2001. *Fiji A Short History*. [Online] <https://lib.byu.edu/PacificStudies/article/>
- [4] Opcit., Brij V. Lal, 2008. Hlm. 12

[5] Michael C. Howard, 1991. *Fiji : Race and Politics in an Island State*. Vancouver: UBC press. Hlm. 19

[6] Jon Fraenkel, Stewart Firth and Brij V. Lal (eds), 2009. *The 2006 Military Takeover in Fiji. a Coup to end all Coups*. Canberra: ANU E Press

[7] Jon Fraenkel, Stewart Firth and Brij V. Lal (eds), 2009. *The 2006 Military Takeover in Fiji. a Coup to end all Coups*. Canberra: ANU E Press

[8] [http://fijinews.com/Frank-Bainimarama/personal live](http://fijinews.com/Frank-Bainimarama/personal%20live)

[9] Brett A. Kayu, 2008. *The Cause's Of Fiji's 5 December 2006 Coup*. Canterbury University

[10] Max G. Manwaring, *A Contemporary Challenge To State Sovereignty*. <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf>.

[11] Sandra Tarte, *Fiji Island's Challenges and Defences Policy Issue's*. [http://www.nids.go.jp/english/publication/joint\\_research/series5/pdf/5-5.pdf](http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series5/pdf/5-5.pdf), Chapter 5, hlm 596

[12] <http://www.coupfourandahalf.com/FijiMilitarySpending>

[13] John Frankel, Stewart Firth, Brij, V. Lal, *The 2006 Military Take Over In Fiji, A Coup to End All Coups?*, The Australian National university, Canberra, ANU E press, 2009, Chapter 2 hal 30

[14] Brij V. Lal. *Anxiety, Uncertainty And Fear In Our Land': Fiji's Road To Military Coup, 2006*, [online] [http://epress.anu.edu.au/coup\\_coup/ch06](http://epress.anu.edu.au/coup_coup/ch06), hal 118

[15] *Militer Dalam Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. hal 96

[16] Brij V. Lal. *Anxiety, Uncertainty And Fear In Our Land': Fiji's Road To Military Coup, 2006*, [online] [http://epress.anu.edu.au/coup\\_coup/ch02.pdf](http://epress.anu.edu.au/coup_coup/ch02.pdf),

[17] Stewart Firth dan Jon Fraenkel. *The Takeover 2.006 Militer di Fiji. Chapter 6. The Fiji military And Etno-Nasionalism*, 2008. The Australian National university, Canberra, ANU E press, 2009, hal 126-128

[18] Realisasi usulan pemerintah perdana menteri Qarase pada tahun 2003 ini RUU Reconciliation and Unity pada tahun 2005.

[19] Stewart Firth dan Jon Fraenkel *The Takeover 2.006 Militer di Fiji. Chapter 6. The Fiji military And Etno-Nasionalism*, 2008. The Australian National university, Canberra, ANU E press, 2008, hal 135

[20] *Constitution Of The Republic Of Fiji, chapter 9*

[21] NIDS, 2010. NIDS Joint Research Series No.5. *Asia Pacific's Countries Securities Outlooks and Its Implications dor the Defences Sektor: Fiji Island's Securities and Defence Policy Issues*. NIDS- Japan, hal 68